

**KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh :

ROSSA NOFITA

NIM. 07011181924032

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik

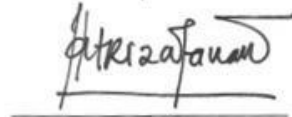
Oleh:

ROSSA NOFITA
NIM. 07011181924032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 17 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP.196810221997022001



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

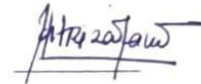
Oleh :
ROSSA NOFFITA
07011181924032

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing :

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan




2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rossa Nofita

NIM : 07011181924032

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Koordinasi Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 18 Juli 2023



Rossa Nofita
NIM. 07011181924032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nobody's perfect.

Jangan lupa ucap syukur di tiap langkahmu, semoga berkah.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya yaitu bpk. Abdul Roni dan ibu. Suryati Sulastri.
2. Saudara Kandung saya Ria dan Aziz.
3. Seluruh Dosen Administrasi Publik.
4. Pegawai dan Staf Fisip Universitas Sriwijaya.
5. Rekan alamamater seperjuangan.

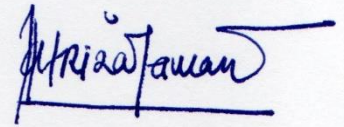
ABSTRAK

Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan program nasional yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Apatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-Rb) merupakan program kompetisi inovasi di bidang pelayanan publik. Program ini dimaksudkan agar dapat diikuti oleh unit pelayanan publik untuk membantu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi yang maksimal antara unit-unit atau instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis koordinasi program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan elaborasi teori yaitu, Bentuk Koordinasi, Mekanisme Koordinasi, dan Faktor Pendukung Koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi pada program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan belum dilakukan secara maksimal karena, masih terkendala pada koordinasi secara vertikal dan peraturan prosedur dalam mekanisme koordinasi.


Kata Kunci: Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Koordinasi, Mekanisme Koordinasi, Faktor Pendukung Koordinasi

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si.
NIP. 196810221997022001



Indralaya, Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

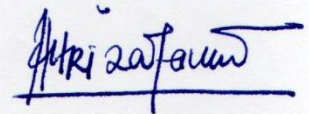
ABSTRACT

The Public Service Innovation Competition Program (KIPP) is a national program created by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPan-RB) which is an innovation competition program in the field of public services. This program is intended to be followed by public service units to help accelerate the improvement of the quality of public service in Indonesia. Implementation of this program requires maximum coordination between related units or agencies. This study aims to identify and analyze the coordination of the Public Service Innovation Competition program at the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. This study uses elaboration theory Forms of Coordination, Coordination Mechanisms, and Supporting Factors of Coordination. The method used in this study is a type of qualitative research with descriptive methods. The data needed in this study consists of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the coordination carried out by the Organizational Bureau in the Public Service Innovation Competition Program in South Sumatra has not been carried out optimally because it is still constrained by vertical coordination and procedural regulations in the coordination mechanism.

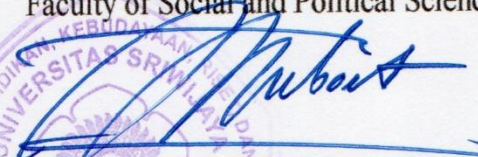
Keyword: Public Service Innovation Competition program, Coordination, Coordination Mechanism, Coordination Supporting Factors

Advisor

Dr. Katriza Imania, M.Si.
NIP. 196810221997022001



Indralaya, Juli 2023
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha pengasih lagi maha penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Koordinasi Pelaksanaan Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Studi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya . Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulisan usulan penelitian.
5. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen FISIP khususnya Jurusan Ilmu administrasi Publik yang telah mengajar saya selama masa perkuliahan dan Staff pegawai bagian administrasi yang telah membantu pengurusan surat, berkas, dan sebagainya
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Zaki Aslam S.IP, M.Si.
8. Bapak Efendi, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Bagian TataLaksana.
9. Bapak Mahendra Karim Brawijaya, S.H selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik.
10. Ibu Roa Sarimalia, S.E., MM selaku Kepala Sub Bagian Akuntabilitas.
11. Ibu dr. H. Unita Magdalena selaku koordinator Rumah Intan
12. Kedua orang tua Bpk. Abdul Roni dan Ibu. Suryati Sulastri serta adik-adik saya Ria dan Aziz yang selalu mendukung baik moril maupun materil.
13. Teman – teman saya, June, Lala, Salsa, Tania yang banyak mendukung moril dalam penyusunan usulan ini, terima kasih.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa kelemahan maka krtitik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna membuat Skripsi ini menjadi lebih baik. Atas kerja sama dan perhatiannya, penulis ucapakan terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin..

Palembang, Juli 2023



Rossa Nofita.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Manajemen Publik	9
2.2.1 Pengertian Manajemen	10
2.2.2 Manajemen Publik.....	11
2.2.3 Pengorganisasian Dalam Manajemen Publik	12

2.3 Koordinasi	13
2.3.1 Pengertian Koordinasi.....	13
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Koordinasi	14
2.3.3 Ciri-Ciri Koordinasi.....	15
2.3.4 Bentuk Koordinasi.....	16
2.3.5 Syarat-Syarat Koordinasi	18
2.3.6 Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Koordinasi	19
2.3.7 Mekanisme Koordinasi	21
2.3.8 Faktor Pendukung Koordinasi.....	22
2.4 Konsep Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	22
2.5 Teori yang Digunakan.....	25
2.6 Kerangka Berpikir.....	27
2.7 Asumsi Penelitian	29
2.8 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Definisi Konsep	34
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data	36
3.5 Informan Penelitian.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
3.8 Keabsahan Data	41
3.9 Sistematika Penulisan.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Wilayah Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	47

4.1.2 Visi dan Misi Biro Organisasi	49
4.1.3 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi.....	50
4.1.4 Struktur Biro Organisasi	51
4.2 Deskripsi Responden/Informan Penelitian	53
4.3 Hasil Penelitian	53
4.3.1 Bentuk Koordinasi	54
4.3.2 Mekanisme Koordinasi	66
4.3.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Koordinasi	75
4.4 Pembahasan dan Diskusi	85
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2. Fokus Penelitian	36
Tabel 4 Informan Penelitian	53
Tabel 6. Matriks Temuan Penelitian.....	83
Tabel 7 Daftar Pertanyaan.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah OPD yang mengikuti program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan	3
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3 Lambang Sumatera Selatan.....	47
Gambar 4 Struktur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ..	51
Gambar 5 Undangan Rapat Eksternal.....	57
Gambar 6 SK. Kadin Dinkes	62
Gambar 7 SK. Tim Panel	64
Gambar 8 Grup Whatsapp JIPP Sumsel Replikasi	69
Gambar 9 Pasal 6 PermenPan-Rb No. 7 Tahun 2021	70
Gambar 10 Persyaratan KIPP	71
Gambar 11 Undangan Coaching.....	74
Gambar 12 Grup Whatsapp.....	75
Gambar 13 Kegiatan Rapat Penilaian Inovasi.....	78
Gambar 14 Kegiatan Verifikasi yang merupakan salah satu tahap penilaian	79
Gambar 15 Foto Rapat Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana KIPP Sumatera Selatan.....	80
Gambar 16 Surat Permohonan Evaluator.....	82
Gambar 17 Bingkai Mou dengan Kepala Daerah.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	95
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan wawancara.....	98
Lampiran 3 SK Judul Skripsi	99
Lampiran 4 Lembar Perbaikan Seminar Proposal	100
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	101
Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian	102
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi.....	103
Lampiran 8 Surat Keterangan Pengecekan Similarity	104
Lampiran 9 Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	105

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG

KIPP	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
KemenPan-Rb	Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
PermenPan-Rb	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
UPP	Unit Pelayanan Publik
JIPP	Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Dinkes	Dinas Kesehatan
SK	Surat Keterangan
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
Bimtek	Bimbingan dan Teknis
PEKPPP	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Setda	Sekretariat Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
DPMTSP	Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu
SAMSAT	Dinas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
CSR	Corporate Social Responsibility
KepMen	Keputusan Menteri
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
TE	Tim Evaluasi
TPI	Tim Panel Independen
DID	Dana Insentif Daerah

:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan arus global yang didasari dengan kemajuan teknologi membuat segala aspek ikut terkena dampak. Canggihnya teknologi membuat dunia menghadapi era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pola *digital economy, robotic, big data, intelligence* membentuk fenomena *disruptive innovation*. Manusia yang hidup berdampingan dengan teknologi dituntut untuk membuat suatu pola untuk dapat bertahan dengan gelombang globalisasi yang dalam hal ini, menjadikan masyarakat memiliki masalah yang kompleks. Transisi mendasar yang terjadi pada setiap aspek kehidupan membuat masyarakat memiliki cara pemenuhan kebutuhan yang berbeda sehingga, mensyaratkan masyarakat mendapat hak warga negara yang optimal.

Pelayanan publik menjadi hakikat hubungan fundamental antara negara dan masyarakat yang menjadikan pelayanan prima yang berkualitas sebagai hasil akhir dari pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi tentang pelayanan publik dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang menetapkan baik tidaknya pelayanan publik yang dilaksanakan. Atensi organisasi publik untuk menciptakan pelayanan prima yang berkualitas, menjadikan lembaga birokrasi memiliki lingkungan tersendiri untuk terselenggaranya pelayanan publik yang optimal sehingga dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas masih dikatakan jauh dari kata ideal direalisasikan di Indonesia, banyak pemenuhan pelayanan publik yang belum terlaksana sehingga adanya tuntutan agar pemenuhan pelayanan publik bisa dicapai.

Sarana untuk pemenuhan dan percepatan pelayanan publik ialah inovasi. Definisi inovasi oleh Rogers disebut "*in innovation is an idea, practice, or object, that is perceive*" inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu (Abadi, 2018) Kehadiran inovasi menjadi produk baru dan memiliki sifat menggantikan corak yang lama, artinya memiliki keterbaruan dalam pelayanan publik. (Muharam dkk., 2019)

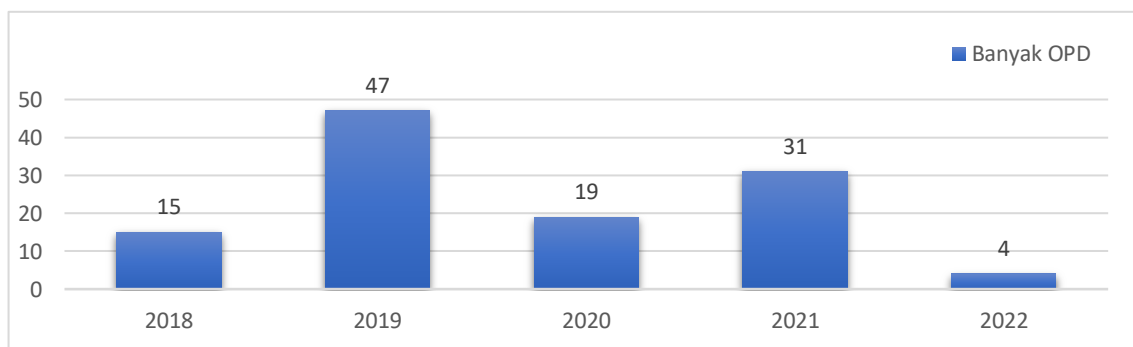
Inovasi digunakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik maka, KemenPan-RB membuat semboyan "*One Agency, One Innovation*" yang merupakan gerakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan di lingkungan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Gerakan ini dijalankan atas dasar kebijakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Sehingga, diharapkan dapat memacu organisasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) berjalan sejak tahun 2014, yang dilaksanakan setiap tahun secara konsisten dan berkelanjutan guna membuktikan bahwa inovasi merupakan salah satu jalur untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PAN-RB tiap tahunnya yang dijadikan pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk tahun berikutnya seperti, S.E. Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2015 sebagai dasar hukum kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016, dan S.E. Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar hukum kompetisi inovasi

pelayanan publik tahun 2017.

Kementrian PAN-RB bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan program KIPP salah satunya, Provinsi Sumatera Selatan yang telah menjadi *Hub JIPP* (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik) sejak Tahun 2018. *Hub JIPP* merupakan platform yang digunakan untuk pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai upaya transformasi pelayanan sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (HUMAS MENPANRB, 2020). Pelaksanaan program KIPP di Sumatera Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 namun, dalam rentang waktu tersebut masih banyak OPD yang tidak berpartisipasi dalam program KemenPan-Rb sebagaimana ditunjukkan gambar 1 berikut.

Gambar 1 Jumlah OPD yang mengikuti program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan



Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Menurut data yang dihimpun dari Biro Organisasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan berjumlah 66 lembaga namun, terlihat perbedaan yang signifikan dari jumlah partisipan yang mengikuti program ini yang ditunjukkan oleh gambar 1. Rendahnya tingkat partisipasi OPD untuk ikut program ini menggambarkan program yang dilaksanakan belum berlangsung secara maksimal, yang semestinya program ini dapat membantu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tujuan PermenPan-Rb No 7 Tahun 2021. Rendahnya angka partisipasi yang

ditunjukkan tidak menutupi bahwa terdapat empat inovasi di tahun 2020 meraih Top Inovasi pada program KIPP. Empat inovasi tersebut yakni, Gerakan Bersama Penyandang Disabilitas (Gema Daya Pentas OKU), Siaga Urusan Penting Kependudukan melalui aplikasi sampai Selesai (Sagarurung Keli Selai), Jemput Bola, Rekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Langsung Cetak di Tempat (Jam Kunci), serta Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah melalui sekolah anak jalanan dan anak putus sekolah Kota Palembang (Poltabes) (Humas MENPANRB, 2020).

Program ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak namun, memerlukan lembaga lain untuk melaksankannya agar tujuan program ini dapat terwujud. Kementerian Pan-Rb berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pelaksanaan program KIPP khususnya Biro Organisasi sebagai fasilitator yang mengkoordinir di Sumatera Selatan dan sebagai penyelenggara dalam menyeleksi inovasi yang bekerja sama dengan beberapa Dinas seperti, Dinas Kesehatan dan Dinas Pencatatan Sipil yang memonitoring inovasi di bidang kesehatan dan di bidang pendudukan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Koordinasi dalam sebuah organisasi sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya kekeliruan, pertikaian dan kesamaan atau kekosongan pekerjaan (Hasibuan, 2014). Pelaksanaan koordinasi menjadi subjek penting dalam melaksanakan program agar memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga terkait untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya atau mengatasi kelemahan sistem yang ada. Konsep koordinasi oleh G.R Terry dalam Hasibuan (2014) mendefinisikan bahwa koordinasi sebagai keselarasan kegiatan dengan waktu yang tepat dan terarah agar menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis sesuai tujuan yang telah ditentukan (Febrian, & Yusran, 2021). Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan,

mengintegrasikan unsur-unsur manajemen pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2014).

Beberapa ahli sepakat bahwa koordinasi merupakan dasar dari manajemen yang bertujuan, menyelaraskan pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan sehingga tercapai sasaran pekerjaan yang telah ditentukan. Koordinasi memiliki 2 tipe yaitu, Koordinasi Vertikal dan Koordinasi Horizontal (Hasibuan, 2014). Koordinasi Vertikal (*vertical coordination*) merupakan kegiatan penyatuan arahan yang dilakukan atasan kepada unit atau satuan kerja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Koordinasi Horizontal (*horizontal coordination*) menyatukan kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi melibatkan berbagai pihak yang memiliki karakteristik berbeda sehingga, membuat koordinasi memiliki sebuah sistem yang mengatur koordinasi yang disebut dengan mekanisme. Mekanisme koordinasi menjadi bagian yang terintegrasi di dalam kajian koordinasi itu sendiri hal ini dikarenakan, koordinasi tidak dapat dijabarkan tanpa mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam koordinasi itu sendiri (Nomani dkk., 2020). Menurut Okhuysen and Bechky (2009) dalam (Davoudi & Johnson, 2022) *coordination mechanisms are 'the organizational arrangements that allow individuals to realize a collective performance'* yang berarti Mekanisme koordinasi adalah 'pengaturan organisasi yang memungkinkan individu untuk mewujudkan kinerja kolektif'. Koordinasi terdapat beberapa unsur mekanisme dasar yang perlu diperhatikan yaitu, Hirarki Manajemen, Peraturan dan Prosedur serta, Perencanaan dan Penetapan Tujuan (Stoner & Freeman, 1992).

Mekanisme Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan memiliki kriteria yang harus dipenuhi salah satunya yaitu, inovasi tersebut sudah berjalan minimal dua tahun untuk bisa ikut kompetisi tingkat nasional. Fakta di

lapangan bahwa dari 37 unit pelayanan publik di Sumatera Selatan yang mengikuti program KIPP tingkat Nasional hanya dua diantaranya yang lolos ke tahap 99 Top Inovasi sedangkan, 35 diantaranya hanya lolos pada tahap 200 Top Inovasi. Organisasi perangkat daerah atau unit pelayanan publik yang tidak lolos dikarenakan belum memenuhi syarat program KIPP yang dianggap terlalu berat sehingga sulit untuk berkomitmen mempertahankan inovasi dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, pergantian atasan juga berdampak kepada inovasi yang direplikasikan, karena inovasi harus menyesuaikan dengan atasan yang baru sehingga sistem inovasi tersebut dapat berubah.

Koordinasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi kepada unit pelayanan publik salah satunya direalisasikan dalam kegiatan *coaching*. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Biro Organisasi untuk meningkatkan motivasi unit pelayanan publik namun, koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi unit pelayanan publik dengan Biro Organisasi. Informasi yang disampaikan terkait pelaksanaan *coaching* tidak ditangkap oleh seluruh unit pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Keterbatasan informasi didasari karena wilayah unit pelayanan publik yang sulit dicapai internet seperti jauh dari daerah perkotaan.

Keberhasilan pelaksanaan mekanisme koordinasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, analisis faktor pendorong meliputi ketersediaan forum, transparansi keputusan, evaluasi kegiatan, dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan (Achyar & Vogt, 2015). Besar peluang koordinasi dapat tercapai apabila faktor pendorong keberhasilan dilaksanakan seutuhnya karena faktor tersebut dapat menyempurnakan kegiatan koordinasi.

Berbagai kajian Koordinasi lembaga telah dilakukan oleh para peneliti yang berfokus pada satu aspek misalnya, pada Aspek Mekanisme Koordinasi (Nomani Faisal dkk., 2020), (Davoudi & Johnson, 2022) (Febrian & Yusran, 2021) Aspek pola koordinasi Setiawati, 2018) (Basnawi dkk., 2019) (Wahyuningsih, 2022) (Vira dkk., 2020), Aspek unsur atau faktor koordinasi (Rizky dkk., 2022), (Audina dkk., 2019), (Safitri dkk., 2018). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak mencakup aspek koordinasi secara utuh. Sementara itu, dalam penelitian ini berusaha mengkaji secara komprehensif tentang koordinasi pelaksanaan program secara vertikal dan horizontal, mekanisme dasar pengkoordinasian, serta faktor pendukung koordinasi dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan mengisi gap dari penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan pada koordinasi pelaksanaan Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Biro Organisasi maka perlu dilakukan penelitian terkait ”Koordinasi Pelaksanaan Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana koordinasi pelaksanaan program kompetisi inovasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis koordinasi pelaksanaan program kompetisi inovasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat manfaat yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai Pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait koordinasi dalam pelaksanaan program dan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi masukan dan sumber informasi bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan koordinasi dalam program pengembangan inovasi pelayanan publik di Sumatera Selatan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, D. T. (2018). *Implementasi program kompetisi inovasi pelayanan publik (kovablik) dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik di jawa timur (Studi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur) SKRIPSI*.
- Achyar, E., & Vogt, S. D. (2015). *Dynamics of the multi-stakeholder forum and its effectiveness in promoting sustainable forest fire management practices in South Sumatra, Indonesia. Environmental Development, 13*, 4–17.
- Anggara, S. (2015). *Metode penelitian administrasi* (B. A. Saebeni, Ed.). Pustaka Setia.
- Anisa Setiawati, N. (2018). *Koordinasi antar instansi dalam inovasi layanan pengaduan darurat command center 112 di kota surabaya*.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp239a25e04bfull.pdf>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian-suatu pendekatan praktek, Cetakan kedua Belas (Edisi Revisi V)* (5 ed.). PT. Rineka Cipta.
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). *Koordinasi antar lembaga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar di kota sukabumi. Tahun, 2*(2), 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Basnawi, C., Adi, W., & Setiyanto, N. (2019). *The Challenge of Coordination in Management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) In Surabaya*.
<https://doi.org/10.20473/adj.v5i1.27014>
- Davoudi, S., & Johnson, M. (2022). *Preconditions of coordination in regional public organizations. Public management review*.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2134915>
- Dewi, R. R., & Kurniawan, T. (2019). *Manajemen perubahan organisasi publik : mengatasi resistensi perubahan. Jurnal Natapraja, 7*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.24599>
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. (2014). *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah* (E. Rahayu, Ed.; edisi revisi, Vol. 12). Bumi Aksara.
- Febrian Febby, & Yusran Rahmadani. (2021). *Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di kota padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3*, 11–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- (fik/HUMAS MENPANRB). (2020, November 3). *Jadi “hub” jipp, sumatra selatan replikasi tiga inovasi*. KemenPan-Rb. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jadi-hub-jipp-sumatra-selatan-replikasi-tiga-inovasi>
- Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, A. J., *Pengembangan program kampung keluarga berencana di kabupaten bangka barat*, K., & Rusli, B.

- (2020). *Family Planning Village Development Coordination Program in West Bangka Regency* *ARTICLE INFO ABSTRACT*. 6(1).
- Muharam, R. S., Melawati, F., Publik, I. A., & Cimahi, S. (2019). *INOVASI Pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di kota bandung*. Dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Nomor 1).
- Nomani Faisal, Agustina Sylvie, & Malinda Febrimarani. (2020). Analisis mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada kantor pemerintah kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir. *JANUARI*, 5(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1023>
- Risnawati, A., Putri, S., & Munawaroh, N. (t.t.). *Koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan destination management organization (dmo) di pangandaran (studi pada disparperindagkop umkm dan kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran provinsi jawa barat)*.
- Rizky, R. M., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2022). *Koordinasi antar diskominfo dengan disdukcapil kota tangerang dalam aplikasi tangerang live*. *Administrativa*, 4 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i1.124>
- Safitri, D., Taufik Hidayat, M., & Sutarjo, M. (2018). *Koordinasi bidang penanganan fakir miskin dengan tenaga kerja sosial kecamatan dan desa dalam program rehabilitasi sosial keluarga berumah tidak layak huni di dinas sosial kabupaten cirebon*. *Jurnal Publika*, 6.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v6i2.1554>
- Solong, A., & Yadi, A. (2021). *Kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik* (M. Agil, Ed.). DEEPUBLISH.
- Stoner, J. A. F., & Freeman, R. E. (1992). *Management (Fifth Edition)*. Englewood Cliffs.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian administrasi edisi revisi* (Setiyawami, Ed.). Alfabeta.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik*. UMJ PRESS.
- Vira, A., Bakti, F., *koordinasi penanggulangan daerah bencana purworejo, k., bakti, v. A., & fadlurrahman, d.* (2020). *Coordination of regional disaster management agencies in disaster management in purworejo district*. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 11(2), 2614–5863.
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1594>
- Wahyuningsih, C. D. (2022). *Koordinasi dan pengawasan program keluarga harapan*. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 19.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/mia.v19i2.3339>

Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen publik : teori dan praktik* (1 ed.). Universitas Brawijaya Press.